

## PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, INVESTASI, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

*Ni Luh Gde Mitha Ardiyanti*<sup>1</sup>

*Ni Nyoman Reni Suasih*<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>*Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, investasi, dan biaya pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Lokasi penelitian di kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali. Jumlah pengamatan penelitian ini adalah 90 pengamatan dengan kurun waktu 10 tahun dan melibatkan 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik observasi non partisipan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa model yang terpilih paling tepat adalah *random effect model* (REM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, upah minimum, investasi, dan biaya pembangunan infrastruktur berpengaruh simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Secara parsial variabel tingkat Pendidikan dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan investasi dan biaya pembangunan infrastruktur berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota Provinsi Bali.

**Kata kunci:** *pendidikan, upah minimum, investasi, infrastruktur, distribusi pendapatan*

Klasifikasi JEL: I25, J3, E2, O1, D33

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effect of education level, minimum wage, investment, and infrastructure development costs on the inequality of income distribution between districts / cities in Bali Province. The location of the study is in districts / cities in Bali Province with secondary data obtained from publications from the Central Statistics Agency, Public Works Office, Spatial Planning, Housing, and Settlement Areas of Bali Province. The number of observations of this study was 90 observations with a period of 10 years and involved 9 regencies/cities in Bali Province. Data collection method in this study through non-participant observation techniques. The analysis technique used is panel data regression analysis. The results of the panel data regression test showed that the most appropriate model was the random effect model (REM). The results of this study show that education level, minimum wage, investment, and infrastructure development costs simultaneously affect income distribution inequally. Partially, the variables of education level and minimum wage have a positive and significant effect, while investment and infrastructure development costs have a negative and insignificant effect on the inequality of income distribution between districts / cities of Bali Province.*

**keyword:** *Education, Minimum Wage, Investment, Infrastructure, Income Distribution*

Klasifikasi JEL: I25, J3, E2, O1, D33

## **PENDAHULUAN**

Ketimpangan pendapatan (dissimilarities) merupakan masalah yang timbul akibat pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Aizawa, 2018). Para perencana pembangunan beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat akan menimbulkan trickle down effect (Badriah, 2019). Singkatnya, teori trickle-down berharap tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat menggerakkan ekonomi di kedua sisi permintaan dan penawaran sehingga pada akhirnya dapat mencapai pemerataan pendapatan untuk menciptakan kekayaan. menjadi untuk semua lapisan masyarakat. Indeks Williamson digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Indeks Williamson adalah alat yang digunakan untuk mengukur perkembangan wilayah suatu wilayah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan distribusi pendapatan yang adil. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan produk domestik bruto (PDB) regional dan tingkat pertumbuhannya dinyatakan dalam harga konstan (Musyawwiri & Üngör, 2019). Perekonomian daerah diharapkan tumbuh ketika kegiatan ekonomi lebih tinggi dari sebelumnya. Selain itu, Provinsi Bali sebagai salah satu daerah yang relatif tersebar luas mengaloi ketimpangan dalam percepatan pembangunan daerahnya. Pembangunan yang dilakukan di daerah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk, tetapi juga untuk mendapatkan kembali pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan daerah lain (R. Kurniawan & Managi, 2018).

Perbedaan pembangunan antar wilayah dapat diukur dengan menggunakan metode Indeks Williamson, dimana data dasarnya adalah produk domestik bruto per penduduk. Ini karena kami membandingkan tingkat pembangunan lintas wilayah, bukan distribusi pendapatan lintas kelompok penduduk. Indeks Williamson adalah hubungan antara ketimpangan regional dan tingkat ekonomi dengan menggunakan data ekonomi maju dan berkembang. Dasar penghitungan Indeks Williamson adalah pendapatan per kapita daerah dan jumlah penduduk masing-masing daerah (Miranti & Mendez, 2022).

Dengan menggunakan Indeks Williamson, maka dapat dilihat seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dan besaran nilai berkisar antara 0-1. Kriteria penilaian Indeks Williamson; Jika nilai Indeks Williamson menjauhi angka 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah dikatakan semakin besar, dan jika nilai Indeks Williamson mendekati 0 (nol), maka menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah dalam wilayah tersebut semakin kecil.

Tabel 1: Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2012-2021

Kabupaten/Kota	Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2012-2021									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jembrana	0.11	0.11	0.18	0.24	0.24	0.24	0.22	0.2	0.25	0.25
Tabanan	0.29	0.29	0.21	0.29	0.29	0.29	0.29	0.24	0.29	0.29
Badung	0.29	0.29	0.2	0.29	0.29	0.29	0.3	0.24	0.28	0.28
Gianyar	0.31	0.31	0.22	0.31	0.31	0.31	0.3	0.25	0.31	0.3
Klungkung	0.2	0.2	0.15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.16	0.21	0.21
Bangli	0.23	0.23	0.17	0.22	0.22	0.22	0.22	0.19	0.24	0.24
Karangasem	0.29	0.29	0.22	0.29	0.29	0.29	0.29	0.24	0.31	0.31
Buleleng	0.34	0.34	0.24	0.34	0.34	0.34	0.34	0.27	0.36	0.36
Denpasar	0.36	0.36	0.25	0.36	0.36	0.36	0.36	0.29	0.32	0.32
Provinsi Bali	0.268	0.268	0.204	0.282	0.282	0.282	0.28	0.231	0.285	0.284

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2012-2022

Data Tabel 1 terlihat bahwa nilai Indeks Williamson (IW) menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali tertinggi pada tahun 2020 mencapai angka 0.285 sedangkan untuk nilai IW terendah diperoleh pada tahun 2014 sebesar 0.204. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa antar kabupaten/kota di Provinsi Bali terjadi ketimpangan pendapatan yang rendah. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar suatu daerah salah satunya yaitu perbedaan kemampuan tiap daerah juga faktor pemilikan sumber daya alam dan persebaran penduduk yang berimplikasi terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam perekonomian antar daerah di Provinsi Bali.

Provinsi Bali yang memiliki 8 kabupaten dan memiliki 1 kota dengan potensi daerah yang relatif berbeda dan telah mengalami disparitas pendapatan. Selain itu, Provinsi Bali memiliki

perbedaan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam pada masing-masing wilayah kabupaten/kota. Perbedaan karakteristik baik dari letak geografis dan potensi sumber daya yang berbeda di masing-masing wilayahnya mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi di Bali.

Tingkat pendidikan diharapkan dapat menjadikan individu dan masyarakat sebagai warga negara yang baik (*member of the nation state*), di satu sisi sadar akan hak dan tanggung jawabnya dan di sisi lain mempersiapkan individu dan masyarakat untuk bekerja. pasar Pendidikan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Perbedaan pendapatan disebabkan oleh overeducation, interaksi antara keterampilan dan pendidikan, serta perbedaan kualitas sekolah atau jurusan (studi) antar daerah. Perguruan tinggi dapat dibentuk berdasarkan masa studi atau jenjang perguruan tinggi, sedangkan mereka yang tidak mengetahui tentang pendidikan jauh dari orang yang berkualifikasi tinggi.

Pendidikan yang lebih tinggi memudahkan untuk mencari pekerjaan, yang mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan kehidupan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih kecil. Perbedaan pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat pendidikan. Pendidikan digunakan sebagai ukuran penting untuk menentukan pendapatan (Permadi, 2018). Sehingga pendidikan menjadi ukuran dalam menentukan tingkat upah yang berkontribusi cukup besar terhadap distribusi pendapatan (Kurniawan, 2016).

Kenaikan tingkat pendidikan masing-masing daerah terus mengalami peningkatan setiap tahun, dan peringkat tertinggi dipegang oleh Kota Denpasar sebesar 11.48 tahun dan Kabupaten Badung sebesar 10.62 tahun sedangkan pada peringkat terendah dipegang oleh Kabupaten Bangli sebesar 7.18 tahun. Faktor-faktor utama yang menyebabkan tingkat pendidikan suatu daerah rendah karena rendahnya kemauan dan *mindset* yang masing menganggap pendidikan kurang penting serta kemampuan ekonomi yang kurang mendukung yang menyebabkan tingkat pendidikan di pedesaan lebih rendah dibandingkan ruang lingkup perkotaan.

Upah minimum kabupaten adalah jumlah yang berguna untuk memastikan upah yang adil bagi pekerja yang mencegah kemiskinan tenaga kerja, termasuk memenuhi kebutuhan standar hidup pekerja. Batas upah minimum kabupaten dan kota mempengaruhi jumlah orang yang memasuki pasar tenaga kerja. Tujuan penetapan upah minimum kabupaten dan kota adalah agar pekerja menerima penghasilan yang layak sebagai imbalan atas layanan tenaga kerja yang mereka berikan kepada mereka yang menggunakannya (Kurniawan & Sulistyaningrum, 2017). Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk mencapai taraf hidup minimum agar penduduk miskin bertambah. (Ningsih, 2015).

Upah berarti menerima imbalan atas pekerjaan yang dilakukan dan sistem pembayarannya sesuai dengan kontrak asli atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Siregar, 2022). Jika upah minimum berada di atas tingkat upah ekuilibrium, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Upah minimum mengambil peran non-pasar dalam menetapkan ambang batas upah minimum di pasar tenaga kerja, yang meningkatkan harga tenaga kerja. Ketika harga tenaga kerja naik, upah minimum mengurangi permintaan tenaga kerja dan membuat beberapa pekerja menganggur (Indradewa & Natha, 2015).

Tingkat upah minimum terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2021 mencapai angka Rp. 2.493.523. Upah minimum tertinggi pada Kabupaten Badung sebesar Rp.2.930.093 sedangkan untuk tingkat upah minimum terendah yaitu Kabupaten Bangli sebesar Rp. 2.494.810. Seperti pada teori ekonomi, alasan upah minimum setiap daerah berbeda-beda salah satu faktor utama yaitu profesi dan tingkat ekonomi yang berbeda pada setiap daerah. Jika dilihat pada tabel daerah Kota Denpasar ataupun Kabupaten Badung memiliki upah minimum yang tinggi karena tuntutan ekonomi dengan harga yang tinggi juga dengan kabupaten lainnya, seperti halnya pada Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, serta Kabupaten Jembrana memiliki tingkat upah minimum yang relatif rendah karena daerah tersebut merupakan daerah pedesaan yang tuntutan ekonomi di setiap daerah tidak terlalu tinggi dan bias dikatakan lebih murah. ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau perbedaan pendapatan antar daerah yang maju dengan daerah yang

tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan.

Investasi merupakan bagian dari PDB (Produk Domestik Bruto) yang menghubungkan masa kini dengan masa depan. Investasi atau investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah modal dan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Konsentrasi investasi hanya pada beberapa daerah menyebabkan perbedaan pendapatan antar daerah. Sebab, investor dalam dan luar negeri hanya mempertimbangkan bidang-bidang yang dianggap menguntungkan (Wiagustini et al., 2017).

Investasi menciptakan ketimpangan. Karena tidak semua kabupaten/kota menjadi sasaran investasi. Investasi merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang sangat penting dan bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi masyarakat (Taufik & Fitriadi, 2016). Penanaman modal atau penanaman modal pemerintah atau swasta dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan dalam pembangunan, baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi adalah komitmen beberapa dana selama periode waktu tertentu untuk menerima pengembalian yang diharapkan terhadap saham yang diinvestasikan di masa depan. Investasi adalah komitmen dari beberapa dana selama periode waktu untuk menerima pengembalian yang diharapkan sebagai unit kompensasi di masa depan. Unit yang diinvestasikan meliputi waktu yang dihabiskan, inflasi yang diharapkan, dan ketidakpastian masa depan (Wiriana & Sudibia, 2022).

Pada tahun 2012 sebesar Rp.12,08 Triliun. Tahun 2015 merupakan puncak tertinggi penanaman modal di Provinsi Bali yaitu sebesar 25,87 Triliun. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada akhir Tahun. Pandemi ini menyebabkan banyak masyarakat yang di pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kehilangan pekerjaan sampai mengalami penurunan pada pendapatan. Penurunan pendapatan pada masyarakat membuat kemampuan daya beli masyarakat tersebut semakin berkurang. Pada kondisi seperti ini, para investor sangat ragu untuk melakukan investasi sampai keadaan kembali normal.

Ketersediaan infrastruktur sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk mendorong produktivitas daerahnya dan untuk menciptakan efisiensi serta efektivitas di berbagai sektor. Salah satu cara untuk mendukung peningkatan PDRB yaitu dengan lebih meningkatkan belanja daerah dalam bidang infrastruktur. Biaya infrastruktur merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pengadaan infrastruktur suatu daerah.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu daerah dapat dihasilkan melalui pembiayaan infrastruktur. Semakin baik kondisi infrastruktur suatu daerah, tingkat mobilitas juga semakin baik. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik akan secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang berbeda pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah yang kemudian akan mempengaruhi pendapatan masyarakat daerah bersangkutan yang tercermin dalam PDRB daerah tersebut.

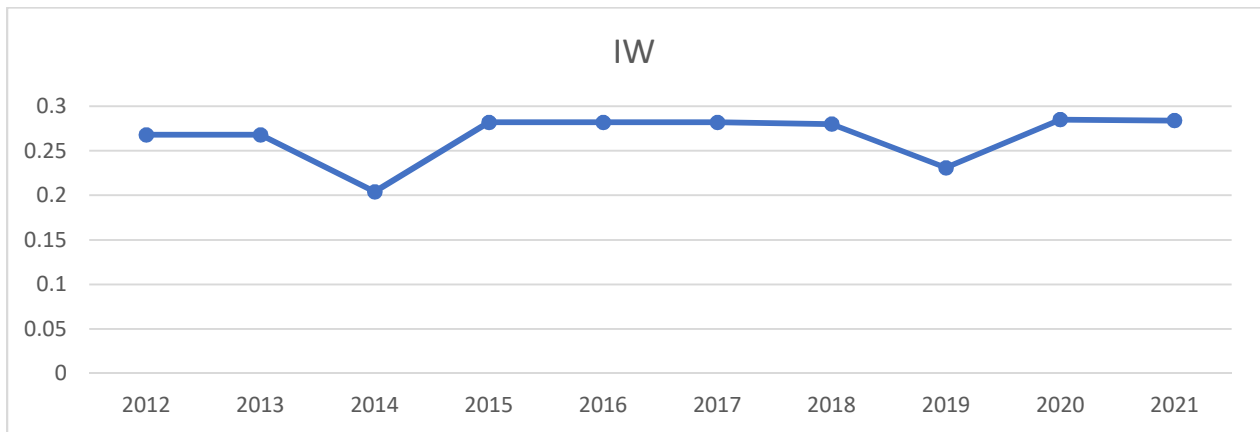
Realisasi anggaran dalam bidang pembangunan infrastruktur menurut satker kewenangan pemerintah daerah dimana pada tahun 2021 pada Kabupaten Bangli sebesar 4.7 milyar rupiah yang merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Sedangkan untuk biaya pembangunan infrastruktur terendah diperoleh oleh Kota Denpasar sebesar 1,2 milyar rupiah. Oleh sebab itu, perlunya peran pemerintah agar seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Bali memiliki akses yang merata. Berlandaskan latar belakang yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk tingkat pendidikan, upah minimum, investasi, dan biaya pembangunan infrastruktur berpengaruh secara parsial dan secara simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, serta untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali selama tahun 2012-2021 tergolong rendah dimana angka dari tahun ke tahun tidak mencapai 0,5 bila dihitung menggunakan Indeks Williamson dan kecenderungan hubungan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dengan

ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota menunjukkan hubungan yang berlawanan. Perbedaan karakteristik wilayah menyebabkan adanya ketimpangan pembangunan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk antarkabupaten/kota. Besar kecilnya ketimpangan PDRB perkapita antarkabupaten/kota memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Provinsi Bali. Ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota yang terjadi di Provinsi Bali selama tahun 2012-2021 dianalisis dengan Indeks Williamson. Hasil perhitungan Indeks Williamson disajikan dalam grafik berikut :

Gambar 1: Indeks Williamson Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2012-2021



Sumber: BPS Provinsi Bali (data diolah)

Dari gambar 1 terlihat bahwa nilai Indeks Williamson selama kurun waktu 2012-2021 selalu berada di bawah angka 0,5 dan belum mendekati angka 1, kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Provinsi Bali memasuki kategori rendah atau bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi antar daerah yang cukup merata. Berdasarkan analisis Indeks Williamson yang dikenalkan oleh Jeffrey G. Williamson, yaitu merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah atau disparitas pendapatan di suatu wilayah. Adapun kriteria Indeks illiamson secara ddetial yaitu besarnya IW adalah  $0 < IW < 1$ . Jika  $IW = 0$ , berarti pembangunan wilayah sangat merata,  $IW=1$ , berarti pembangunan wilayah tidak merata atau bisa juga disebut dengan ksenjangan sempurna,  $IW \sim 0$ , berarti pembangunan wilayah semakin merata dsn  $IW \sim 1$ , berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata. Berdasarkan perhitungan tersebut



maka penelitian diatas yang tingkat ketimpangan pendapatan rata-rata hamper mencapai angka 0,3 maka tingkat kabupaten/kota di Provinsi Bali masih tergolong rendah.

Tabel 2: Hasil estimasi data

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	0.129350	1.258084	0.211800
X1	0.002834	2.387459	0.0192**
X2	-0.028229	-4.812781	0.00000*
X3	-0.000310	-0.202298	0.840200
X4	-0.000141	0.100508	0.920200
R <sup>2</sup>	0.846928	F-statistic	66.39467
Adj R <sup>2</sup>	0.834172	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber data: *Data Eviews yang telah diolah, 2023*

\*p<0,1 \*\*p<0,05 \*\*\*p<0,01

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dari Tabel 2 terlihat nilai Adj( $R^2$ ) sebesar 0.834172 atau 83.42%, artinya variabel bebas yakni Pendidikan, Upah minimum, Investasi, dan biaya pembangunan infrastruktur dalam menjelaskan perubahan variabel Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali terbatas hanya sebesar 83.42% dan sisanya sebesar 16.57% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Model regresi menghasilkan nilai F hitung sebesar 66,39467 dan nilai signifikansi adalah 0.00000 yang berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas pada model regresi secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel terikat. Artinya Tingkat Pendidikan, Upah minimum, Investasi, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur berpengaruh secara simultan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Hasil perhitungan secara parsial pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali diperoleh koefisien regresi sebesar 0.002834 Dengan tingkat signifikansi = 0.5, diperoleh nilai t sebesar 2.387459 dan signifikansi sebesar 0.0192 ( $p\text{-value}<0.05$ ). Dengan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi kurang dari  $\alpha = 0,05$ , Karena nilai signifikansi kurang dari 0.05, maka  $H_0$  ditolak, dan  $H_a$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap

Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali” diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wahyuni & Monika (2016) yang menunjukkan bahwa hubungan positif dan signifikan antara pendidikan dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya apabila terjadi kenaikan tingkat pendidikan sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan pada ketimpangan distribusi pendapatan. Pendidikan tertinggi ditamatkan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang paling banyak yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Tingginya pendidikan yang ditamatkan di ikuti dengan ketimpangan yang tinggi pula yaitu di Kota Denpasar. Hal tersebut terjadi karena penduduk pada daerah perkotaan seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung lulusan SMA ataupun perguruan tinggi masih ada yang menjadi pengangguran. Pengangguran tersebut disebabkan karena pencari kerja tersebut memilih untuk menunggu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan keinginannya. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak memiliki pendapatan sehingga tingkat ketimpangan pendapatan meningkat.

Hasil perhitungan secara parsial pengaruh Upah Minimum terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali diperoleh koefisien regresi sebesar -0.028229. Dengan tingkat signifikansi = 0.5, diperoleh nilai t sebesar -4.812781 dan signifikansi sebesar 0.000 ( $p\text{-value} < 0.05$ ). Dengan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi kurang dari  $\alpha = 0,05$ , Karena nilai signifikansi kurang dari 0.05, maka  $H_0$  ditolak, dan  $H_a$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali” diterima. Hal ini berarti ketika jika terjadi peningkatan beberapa persen upah minimum kabupaten maka akan menurunkan pendapatan di Provinsi Bali sebesar 0.028229. Hal ini didapatkan hasil bahwasannya upah minimum antar kabupaten/kota meningkat akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Ketika upah naik maka ketimpangan akan turun. Dimana ketika upah meningkat akan meningkatkan daya beli atau konsumsi masyarakat yang berdampak pada peningkatan

permintaan barang dan jasa di suatu daerah yang menandakan perbaikan perekonomian yang berujung peningkatan perekonomian di daerah yang akan membuat ketimpangan menjadi rendah anatar daerah lain ketika perekonomian daerah cenderung membaik. Jika dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat upah minimum kabupaten maka akan semakin rendah ketimpangan pendapatannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anshari et al., (2019) yang mengatakan bahwa tingkat upah minimum suatu kabupaten memberi dampak negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, menunjukkan bahwa upah minimum akan mengurangi ketimpangan pendapatan dikarenakan bahwa peningkatan dari upah minimum akan mengurangi arus migrasi khususnya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dan menengah.

Hasil perhitungan secara parsial pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali diperoleh koefisien regresi sebesar -0.000310 Dengan tingkat signifikansi = 0.5, diperoleh nilai t sebesar -0.202298 dan signifikansi 0.8402. ( $p\text{-value} > 0.05$ ). Dengan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka  $H_a$  ditolak, dan  $H_0$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa Investasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi "Investasi berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali" ditolak. Hal ini berarti, jika penanaman modal atau investasi dalam suatu daerah meningkat setiap 1% maka investasi akan diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan teori Harrod-Domar yang menerangkan bahwa naiknya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita menjadi meningkat karena adanya kegiatan-kegiatan produktif. Investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja langsung telah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan dengan persebaran dan kenaikan investasi maka akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini sejalan dengan Mansyur et al., (2021) yang menjelaskan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Hasil perhitungan secara parsial pengaruh Biaya Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali diperoleh koefisien regresi sebesar -0.000141. Dengan tingkat signifikansi = 0.5, diperoleh nilai t sebesar 0.100508 dan signifikansi sebesar 0.9202 ( $p\text{-value} > 0.05$ ). Dengan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka  $H_a$  ditolak, dan  $H_0$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa Biaya Pembangunan Infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “Biaya Pembangunan Infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali” ditolak. Koefisien yang bernilai negatif berarti semakin tinggi pengeluaran pemerintah dalam bidang infrastruktur maka ketimpangan distribusi pendapatan akan berkurang. Apabila infrastruktur jalan terus menerus dikembangkan dan merata maka akan memberikan pengaruh yang positif bagi pembangunan ekonomi sehingga akan meningkatkan daya saing ekonomi daerah dalam perekonomian nasional terhadap perekonomian internasional. Di Provinsi Bali pembangunan akan infrastruktur sangat diperlukan guna menunjang kegiatan ekonomi berjalan dengan baik khususnya untuk daerah yang memiliki akses terbatas seperti Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli, sehingga pengeluaran pemerintah dalam bidang infrastruktur memiliki pengaruh dalam menurunkan angka ketimpangan di suatu daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pradnyadewi & Purbadharmaja (2017) yang mengatakan biaya infrastruktur berpengaruh negative dan signifikan. Selain itu pada penelitian lainnya yang mendukung yaitu dari Wijayanti & Khoirunurrofik (2022) mendukung hasil pada penelitian ini yang menyatakan bahwa pembiayaan dalam bidang infrastruktur memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Investasi, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur berpengaruh signifikan secara simultan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tingkat Pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan dan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan, variabel investasi dan biaya pembangunan infrastruktur

berpengaruh negatif tidak signifikan. Diantara keempat variabel independent yaitu tingkat pendidikan, upah minimum, investasi, dan biaya pembangunan infrastruktur yang berpengaruh dominan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan adalah upah minimum ( $X_2$ ).

Dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan untuk pemerintah setempat khususnya bagi daerah pedesaan solusi yang dapat dilaksanakan yaitu pemberian beasiswa pada siswa kurang mampu dan pada siswa berprestasi serta dengan pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan pada daerah pedesaan yang dapat menunjang kegiatan pendidikan berjalan dengan baik. Selain itu, kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah berupa biaya pendidikan pada wilayah pedesaan baik biaya langsung maupun tidak langsung (*opportunity cost*) sekolah, juga disubsidi oleh pemerintah melalui program BOS. Program ini merupakan salah satu pemerintahan yang netral akan gender.

Pengaruh upah minimum pada analisis ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan bahwa upah minimum telah menjadi alat yang tidak efisien. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa upah minimum berpengaruh secara negatif dan signifikan. Dimana dalam suatu daerah meningkatnya tingkat upah minimum maka akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan pemerintah melakukan kebijakan upah minimum tersebut, pemerintah harus menetapkan standar baku yang baru sedekat mungkin dengan kebutuhan dasar manusia dengan mempertimbangkan setiap sektor kebutuhan hidupnya.

Investasi yang berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat investasi pada suatu daerah maka ketimpangan distribusi pendapatan semakin merata. Pemerintah dapat melakukan peningkatan dan pemerataan investasi sehingga stok modal dapat dimanfaatkan dengan maksimal sehingga dapat terjadi kegiatan-kegiatan yang produktif pada daerah setempat.

Biaya Pembangunan Infrastruktur memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin tinggi biaya pembangunan infrastruktur maka semakin rendah ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu daerah. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pemerataan biaya pengembangan infrastruktur pada setiap daerah terutama pada daerah yang memiliki infrastruktur yang buruk dan lebih meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kegiatan perekonomian pada daerah tersebut.

## REFERENSI

- Aizawa, T. (2018). Regional Disparity in the Body Mass Index Distribution of Indonesians: New Evidence Beyond The Mean. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(1), 85–112. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1406596>
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.4990>
- Badriah, L. S. (2019). Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kaitannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Serta Faktor –Faktor Yang Mempengaruhinya. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper (SCA 9)*, 9(1), 232–248.
- Inradewa, I. G. A., & Natha, K. S. (2015). Pengaruh Inflasi , PDRB Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(8), 923–950.
- Kurniawan, J. (2016). Dilema Pendidikan dan Pendapatan di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 09(01), 59–67.
- Kurniawan, R., & Managi, S. (2018). Economic Growth and Sustainable Development in Indonesia: An Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 339–361. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1450962>
- Kurniawan, S., & Sulistyaningrum, E. (2017). Dampak Serikat Buruh Terhadap Tingkat Upah Buruh Sektor Swasta di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*, 10(2), 193–215.
- Mansyur, K., Nurisni, & Hamrullah, H. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selata. *Development Policy and Management Reveiw*, 1(2), 79–107.
- Miranti, R. C., & Mendez, C. (2022). Social and Economic Convergence across Districts in Indonesia: A Spatial Econometric Approach. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 1(1),

1–31. <https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2071415>

- Musyawwiri, A., & Üngör, M. (2019). An Overview of the Proximate Determinants of Economic Growth in Indonesia Since 1960. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(2), 213–237. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1550251>
- Ningsih, N. M. C. (2015). Pengaruh Modal dan Tingkat Upah terhadap Nilai Produksi serta Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kerajinan Perak. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*, 8(1), 83–91.
- Permadi, Y. A. (2018). Growth, Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*, 11(2), 216–233. <https://doi.org/10.24843/jekt.2018.v11.i02.p08>
- Pradnyadewi, D., & Purbadharmaja, I. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(2), 255–285.
- Siregar, T. H. (2022). Investigating the Effects of Minimum Wages on Employment, Unemployment and Labour Participation in Java: A Dynamic Spatial Panel Approach. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(2), 195–227. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1914817>
- Taufik, M., & Fitriadi, E. R. (2016). Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*, 7(2), 90–101.
- Wahyuni, N. T., & Monika, A. K. (2016). Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Di Indonesia (the Impact of Education on Income Inequality Among Indonesian Workers). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(1), 15–28.
- Wiagustini, N. L. P., Mustanda, I. K., Meydianawathi, L. G., & Abundanti, N. (2017). Potensi Pengembangan Investasi Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*, 10(2), 155–173.
- Wijayanti, S., & Khoirunurrofik. (2022). Corruption, Road Infrastructure Quality and Income Inequality. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*, 15(2), 163–177.
- Wiriana, I. G., & Sudibia, I. K. (2022). Pengaruh Investasi , Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesempatan Kerja dan Kemiskinan Menurut Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*, 15(2), 270–291.